

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Yang Ada di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Adapun bentuk sistemnya berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diterapkan sebelum tahun 2021. Kemudian di tahun 2021 diterapkannya sistem baru yakni SIPD tetapi karena kinerja sistem yang kurang maksimal, maka BPKPD Kota Cirebon kembali menggunakan SIMDA dalam pengoperasionalannya.

2. Cara Mewujudkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon

Untuk mewujudkan sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, BPKPD Kota Cirebon melakukannya berdasarkan prosedur yang ada secara ketat karena keuangan merupakan hal yang sangat rentan. BPKPD melakukan pelaporan secara berkala terhadap pemerintah provinsi dan pusat sebagai bentuk akuntabilitas keuangan daerah. BPKPD tidak bisa secara detail melakukan transparansi keuangan daerah kepada masyarakat karena ini merupakan privasi negara.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas BPK menyebutkan bahwa menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 1 desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun

yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SIMDA Keuangan di BPKPD Kota Cirebon sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan cara gencar memberikan solusi disertai pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang mempunyai dasar pengetahuan khususnya akuntansi pemerintahan agar penerapan SIMDA Keuangan dapat berjalan optimal.
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang dimiliki dengan melakukan kontroling terhadap bagian penyusun laporan secara berkala agar laporan keuangan dapat akuntabel sesuai dengan data akurat yang terjadi di lapangan supaya mencegah terjadinya data yang rumpang. Dimana ini merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan.

